

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 138 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TAMBAKROMO

KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kegiatan dan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
15. Peraturan . . .

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan . . .

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
25. Peraturan . . .

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
26. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
27. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 43), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 12 Desember 2020

BUPATI PATI,

Ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 12 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH MM
P A Pembina Tingkat I

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 138 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN TAMBAKROMO
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruangan, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait kewajiban Perangkat Daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat (2) mengamanatkan bahwa “Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Kecamatan Tambakromo sebagai salah satu perangkat daerah yang bertugas menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa mempunyai kewajiban menyusun rencana strategis Kecamatan Tambakromo.

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan pengendalian terhadap dokumen RENSTRA 2017-2022, serta amanat peraturan perundangan yang berlaku diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tertera dalam pasal 343 ayat (9) PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan

kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, Pasal tersebut sebagai dasar penyesuaian kegiatan dalam perubahan RENSTRA. Berikutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diamanatkan setiap Perangkat Daerah agar melaksanakan pemetaan dari program/kegiatan lama ke Program/kegiatan/sub kegiatan baru. Amanat tersebut mengakibatkan terjadinya perbaikan indikator kegiatan yang masih bersifat hasil aktivitas, hal tersebutlah yang mendasari adanya perbaikan dan penajaman indikator output serta penyesuaian target kegiatan dalam perubahan RENSTRA.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati tahun 2017 – 2022;
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2018 tentang tentang Rencana Strategis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022.

1.3 **Maksud dan Tujuan**

1.3.1 Maksud perubahan RENSTRA Kecamatan Tambakromo

Renstra Kecamatan Tambakromo merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang yang mana sudah dilaksanakan 2 (dua) tahun. Penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo untuk Tahun 2017–2022 ini dimaksudkan untuk:

- 1). Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2). Mendorong tercapainya sasaran pembangunan khususnya di lingkungan Kecamatan Tambakromo yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- 3). Mengetahui hal-hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus ditindaklanjuti dalam memenuhi Tujuan dan Sasaran untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan.
- 4). Sebagai acuan penerapan strategi dan arah kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun
- 5). Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Tambakromo dalam kurun waktu 5(lima) tahun mendatang, yaitu: Tahun 2017–2022.

1.3.2 Tujuan Perubahan RENSTRA Kecamatan Tambakromo

Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Tahun 2017 –2018 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Kecamatan Tambakromo dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Tahun 2017–2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). Sebagai alat sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan antara RPJMD Kabupaten Pati dengan Renstra Kecamatan Tambakromo Tahun 2017 – 2022.
- 2). Sebagai dasar menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Perjanjian Kinerja (PK) di Wilayah Kecamatan Tambakromo
- 3). Sebagai dasar pengukuran kinerja 5 (lima) tahun mendatang.
- 4). Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem pemerintahan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang perubahan RENSTRA, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan PD terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra pada tahun yang sudah dilalui (2018, 2019) karena RENSTRA saat ini adalah RENSTRA perubahan, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Tahun 2020-2022.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pelayanan PD Kabupaten Pati berdasarkan tugas dan fungsinya; telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; telaahan Renstra PD yang terkait Kecamatan; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan isu-isu strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah PD Kabupaten Pati.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD Kabupaten Pati dalam 5 (lima) tahun mendatang;

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merujuk pada setiap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai PD Kabupaten Pati dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah. .

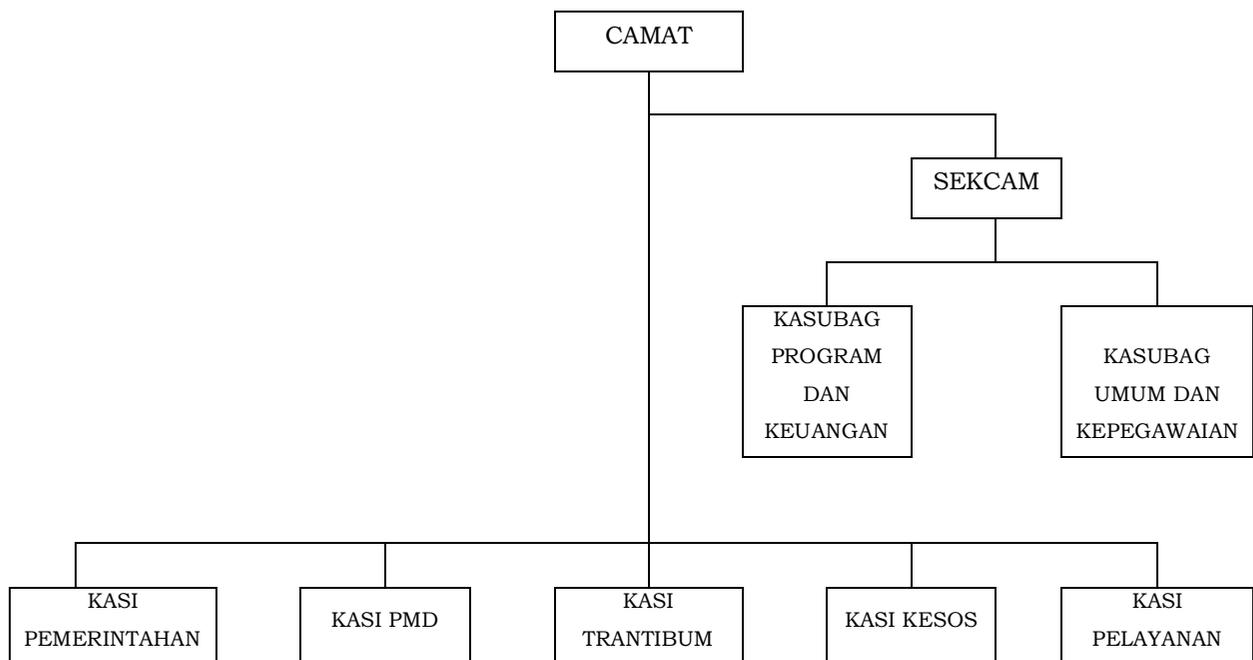
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tambakromo

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, susunan organisasi Kecamatan Tambakromo terdiri atas:

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
KANTOR KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI**



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tambakromo

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;

- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel II.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<p>Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<p>Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dan pengesahan anggota Badan Permasyarakatan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel II.2.

Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tambakromo, 2020

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Tambakromo berjumlah 18 orang, terdiri dari 13 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang Pegawai Non PNS (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Tambakromo	2		7	-	4	5	18	
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	
	- Kasubag Program & Keu	-	-	1	-	-	-	1	

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Pelayanan	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	
	- Staf Seksi Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	1	
	- Staf Seksi Kesos	-	-	-	-	1	-	1	
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	-	1	1	
	- Staf Subbag Program dan Keuangan	-	-	-	-	-	1	1	
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	2	3	5	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tambakromo, 2020.

Tabel II.4

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Tambakromo	-	-	4	3	-	-	7	2	2	-	13	5
	- Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Staf Seksi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Seksi Kesos	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Staf Subbag Program dan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Pegawai Non PNS	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	2	3

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tambakromo, 2020

Tabel II.5

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Tambakromo	2	-	8	2	1	-	2	3	13	5
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Seksi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Seksi Kesos	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Staf Subbag Program dan Keuangan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tambakromo, 2020

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel II.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	3	unit	Baik	
2	Ruangan	9	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	2012
4	Kendaraan roda 2	10	unit	7 baik, 3 kurang baik	
	peralatan kerja :		unit		
5	- Komputer	5	unit	5 baik	
6	- Laptop	9	unit	5 baik, 3 kurang baik, 1 hilang	
7	- Printer	8	unit	6 baik, 2 kurang baik	
8	- Meja	36	unit	30 baik, 6 kurang baik	
9	- Kursi	103	unit	100 baik, 3 kurang baik	
10	- AC	7	unit	6 baik, 1 kurang baik	
11	- Almari	6	unit	5 baik, 1 kurang baik	

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
12	- Filling cabinet	12	Unit	9 baik, 3 kurang baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tambakromo, 2020

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 11 unit termasuk mobil maka kedepan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 3 unit dikarenakan 3 unit motor untuk penggantian motor yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Tambakromo saat ini sebanyak 5 unit dengan 5 dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 2 unit lagi untuk pelayanan.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Tambakromo saat ini sebanyak 9 unit dengan 5 dalam kondisi baik 3 kondisi kurang baik dan 1 unit laptop hilang karena pencurian, dan mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 6 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Tambakromo saat ini sebanyak 8 unit dengan 6 dalam kondisi baik, 2 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 4 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Tambakromo saat ini sebanyak 36 unit dengan 30 dalam kondisi baik dan 6 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 3 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian meja yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Tambakromo saat ini sebanyak 103 unit dengan 100 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 3 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Tambakromo saat ini sebanyak 7 unit dengan 6 dalam kondisi baik, dan 1 kondisi kurang baik, maka ke

depan masih membutuhkan penambahan AC sebanyak 5 unit lagi untuk Aula/Ruang Rapat dan penggantian AC yang kurang baik.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Tambakromo saat ini sebanyak 6 unit dengan 5 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 3 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Tambakromo saat ini sebanyak 12 unit dengan 9 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 4 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya *filling cabinet* dan penggantian *filling cabinet* yang kurang baik dan rusak.

2.2.3. Kondisi umum Kecamatan Tambakromo

2.2.3.1. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Tambakromo merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 67.247 Ha. Secara administratif Kecamatan Tambakromo dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kab. Grobogan
- Bagian Utara : Kecamatan Gabus Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Kecamatan Winong Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kecamatan Kayen Kabupaten Pati



Gambar 2.2 Peta Kecamatan Tambakromo

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Tambakromo dapat dilihat dalam tabel II.7 berikut ini :

Tabel II.7

Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Tambakromo

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
1	Pakis	586	12	3	
2	Maitan	949	32	5	
3	Wukirsari	622	9	3	
4	Sinomwidodo	546	33	5	
5	Keben	456	25	4	
6	Larangan	498	6	2	
7	Tambakromo	300	26	4	
8	Mojomulyo	194	12	5	
9	Karangawen	462	9	2	
10	Mangunrekso	434	16	3	
11	Tambaharjo	334	18	3	
12	Tambahagung	465	22	6	
13	Sitirejo	246	17	2	
14	Kedalingan	256	21	3	
15	Karangmulyo	186	11	2	
16	Karangwono	209	24	4	
17	Angkatan Lor	253	27	3	
18	Angkatan Kidul	251	20	3	

Sumber: Kecamatan Tambakromo dalam angka 2020

2.2.3.2. Keadaan penduduk

Kecamatan Tambakromo memiliki jumlah penduduk sebanyak 60.095 jiwa, yang terdiri dari 29.634 jiwa laki-laki dan 30.461 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Tambakromo tahun 2016 berjumlah 16.257 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2019 yang dilihat kepadatan penduduk sebesar 1.173 jiwa per Km persegi. Profil kependudukan Kecamatan Tambakromo digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel II.8**Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Tambakromo**

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
1	0-4	1.435	50,3	1.413	49,7	2.848	100
2	5-9	2.086	51,6	1.953	48,4	4.038	100
3	10-14	1.975	52,7	1.772	47,3	3.747	100
4	15-19	1.574	50,9	1.517	49,1	3.091	100
5	20-24	2.040	47,9	2.218	52,1	4.258	100
6	25-29	2.076	48,1	2.234	51,9	4.310	100
7.	30-34	2.115	49,3	2.174	50,7	4.289	100
8	35-39	2.261	49,1	2.342	50,9	4.603	100
9	40-44	2.189	50,5	2.145	49,5	4.334	100
10	45-49	1.987	48,6	2.103	51,4	4.090	100
11	50-54	1.952	48,6	2.060	51,4	4.012	100
12	55-59	1.843	50,6	1.799	49,4	3.642	100
13	60-64	1.658	52,8	1.481	47,2	3.139	100
14	65-69	1.045	54,5	874	45,5	1.919	100
15	70-74	616	46,3	714	53,7	1.330	100
16	75+	1.039	48,8	1.090	51,2	2.129	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2019

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Tambakromo sebagai berikut:

Tabel II.9**Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Tambakromo**

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
1	Tidak/Belum Sekolah	6.664	6.761	13.425	24,11%
2	Belum Tamat SD/Sederajat	2.967	3.068	6.035	10,83%
3	Tamat SD / Sederajat	10.135	9.937	20.072	36,04%
4	SLTP/Sederajat	4.499	4.653	9.152	16,43%
5	SLTA/Sederajat	2.954	2.479	5.433	9,75%
6	Diploma I/II	68	110	178	0,31%
7	Akademi/DiplomaIII/Sarmud	139	231	370	0,66%
8	Diploma IV/Strata I	441	543	984	1,76%

9	Strata II	14	15	29	0,05%
10	Strata III	1	2	3	0,005%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2019

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Tambakromo sebagai berikut:

Tabel II.10

Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Tambakromo

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	6.998	6.381	13.379	24,77%
2	Mengurus rumah tangga	4	5.629	5.633	10,43%
3	Pelajar/mahasiswa	2.963	2.403	5.366	9,93%
4	Pensiunan	116	41	157	0,29%
5	PNS	177	90	267	0,49%
6	TNI	35	0	35	0,06%
7	Polri	55	1	56	0,10%
8	Pedagang	122	141	263	0,48%
9	Petani/pekebun	5.597	5.656	11.253	20,83%
10	Peternak	4	0	4	0,007%
11	Nelayan	10	3	13	0,02%
12	Industri	5	2	7	0,01%
13	Konstruksi	2	0	2	0,003%
14	Transportasi	6	0	6	0,011%
15	Karyawan swasta	713	530	1.243	2,30%
16	Karyawan BUMN	37	5	42	0,07%
17	Karyawan BUMD	10	9	19	0,03%
18	Karyawan Honorer	32	48	80	0,14%
19	Buruh harian lepas	133	48	181	0,33%
20	Buruh tani	541	669	1.210	2,24%
21	Wiraswasta	9.364	5.419	14.783	27,37%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2019

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Tambakromo sebagai berikut:

Tabel II.11**Profil Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Tambakromo**

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	27.794	27.701	55.495	99,66%
2	Kristen	79	89	168	0,30%
3	Katolik	3	5	8	0,01%
4	Hindu	0	1	1	0,001%
5	Budha	0	0	0	0,00%
6	Konghuchu	0	0	0	0,00%
7	Aliran Kepercayaan	6	3	9	0,016%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2019

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Terkait dengan kinerja Kecamatan Tambakromo selama dua tahun sebelumnya, menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan pada Kecamatan Tambakromo dalam kurun periode 2018-2019 sebagai berikut:

Tabel II.12
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMBAKROMO
KABUPATEN PATI

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan		100%	100%	100%	100%	100	100
2	Persentase pos kampling aktif		60%	63%	61%	65%	101	103
3	Persentase anggota Linmas aktif		60%	65%	60%	68%	100	104
4	Rasio Poskamling		4.2	4.5	4.3	4.5	102	100
5	Rasio Anggota Linmas		0.031	0.032	0.031	0.032	100	100
6	Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan		0.6600	0.6800	0.6895	0.7039	104	103
7	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat		100%	100%	100%	100%	100	100
8	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)		0.7000	0.7150	0.7256	0.7450	103	104
9	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)		0.6000	0.6150	0.6213	0.6333	103	102
10	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)		0.7000	0.7150	0.7214	0.7333	103	102

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.		100%	100%	100%	100%	100	100
12	Persentase LPMD aktif		30%	50%	35%	50%	116	100
13	Persentase PKK desa aktif		80%	85%	80%	85%	100	100
14	Persentase Karang Taruna aktif		40%	48%	40%	50%	100	104
15	Persentase RT/RW aktif		70%	76%	70%	76%	100	100
16	Persentase Posyandu aktif		75%	80%	75%	80%	100	100
17	Persentase penyaluran rastra		100%	100%	100%	100%	100	100
18	Persentase penyaluran PKH		100%	100%	100%	100%	100	100
19	Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)		100%	100%	100%	100%	100	100
20	Indek Kepuasan Masyarakat kecamatan terhadap pelayanan kependudukan		60%	65%	62%	80,61%	103	124
21	Persentase Realisasi Capaian RKPDes		65%	70%	100%	100%	153	142
22	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPDes kabupaten		6%	8%	8%	8%	133	100

Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 2017-2022

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
23	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100	100
24	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan		60%	65%	50%	78%	84	120
25	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten		6%	8%	8%	8%	133	100
26	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib		89%	90%	94%	94%	105	104
27	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100	100
28	Persentase keterisian data monografi kecamatan		78%	80%	78%	80%	130	100
29	Persentase keterisian data profil kecamatan		60%	65%	78%	78%	130	120
30	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa		65%	75%	70%	80%	107	106
31	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan		82%	85%	86%	89%	104	104

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu		89%	92%	94%	94%	105	102
33	Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan		89%	79%	94%	83%	105	105
34	Pertumbuhan pemohon Paten		60	65	83	81	138	124
35	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100	100
36	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100	100

Dari tabel II.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capain yang kurang baik ((100% (x < 100%)) terjadi pada tahun 2018 dengan indikator Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan, akan tetapi sudah ada peningkatan rasio pada tahun 2019. Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% (x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan mengalami keberhasilan karena koordinasi yang baik antara semua stakeholder yang ada di kecamatan sehingga pelanggaran K3 bisa tertangani.
- Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan mengalami keberhasilan karena kekompakan semua lembaga desa di dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Indikator Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat mengalami keberhasilan karena kerjasama yang baik antara semua lembaga yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial.
- Indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani mengalami keberhasilan karena kerjasama yang baik antara pemerintah desa, kecamatan dan Dispendukcapil sehingga pelayanan bisa maksimal.
- Indikator Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten mengalami keberhasilan karena adanya penerapan sistem Pagu Indikator Kecamatan (PIK) yang merupakan pembatasan usulan ke tingkat Kabupaten untuk penjaringan skala prioritas.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Kinerja pelayanan kecamatan Tambakromo diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.13
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMBAKROMO
KABUPATEN PATI

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	Pertumbuhan	
	4	5	4	5	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	186.393	233.066	203.002	202.739	108,91	86,98	0,25	(0,12)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur	96.270	152.774	82.237	70.653	85,42	46,24	0,58	(0,46)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11.600	13.600	11.600	11.982	100,00	88,10	0,17	(0,14)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.006	4.597	4.037	5.338	100,77	116,11	0,14	(0,12)
Program Penataan Administrasi Kependudukan	17.500	24.500	1.239	24.554	7,08	100,22	0,4	(0,94)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	31.000	39.000	16.313	13.719	52,62	35,17	0,25	(0,58)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	Pertumbuhan	
	4	5	4	5	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	38.000	52.000	25,567	37.006	67,28	71,16	0,36	(0,99)
Program Pengembangan Data/ Informasi	15.000	8.946	2,765	13.386	18,43	149,63	-0,40	(0,99)
Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	-	21.641	-	10.860	#DIV/0!	50,18	#DIV/0!	(1)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	25.393	35.500	12.599	14.041	49,61	39,55	0,39	(0,64)
Program Peningkatan Investasi dan Realisasi Investasi	32.000	41.500	11.541	45.843	36,06	110,46	0,29	(0,72)
Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	34.000	42.500	12.133	78.342	35,68	184,33	0,25	(0,71)

Dari tabel II.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja outcome tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik. Dalam penentuan proyeksi anggaran di RENSTRA jumlah anggaran tiap – tiap perangkat daerah mengacu pada kapasitas riil anggaran di RPJMD yang mana struktur anggarannya sudah dibagi dalam (P1) untuk progra wajib mengikat, (P2) untuk program prioritas dan (P3) program pendukung visi dan misi kepala daerah (P3). Program yang ada di Kecamatan Tambakromo hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif. Hasil analisa dari rasio yang ada dapat disimpulkan pada tahun 2018 penganggaran program ada yang seimbang dan kurang baik. Program pada tahun tersebut hampir 75% memiliki rasio yang seimbang ((100% ($x = 100\%$)), dimana hal tersebut menunjukkan perencanaan dengan pelaksanaannya sesuai. Program yang 25% masuk kategori kurang baik ((100% ($x > 100\%$)) terjadi pembengkakan anggaran, hal itu terjadi karena faktor perencanaan yang kurang tepat dengan penganggaran tahunan program yang mungkin disebabkan karena kurangnya data dan informasi yang ada.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2019 ditemukan bahwa program di Kecamatan Tambakromo ada yang baik ((100% ($x > 100\%$)) dan kurang baik ((100% ($x > 100\%$)). Efisiensi dan kewajaran dijadikan dasar dalam menganalisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran, dari sekian program hampir 75% yang rasio anggarannya bisa dianggap baik. Ketercapaian itu tak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga outcome tercapai sesuai dengan target. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik pada tahun 2019 dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan program pelayanan kepada masyarakat diperkirakan pengajuan masyarakat terhadap pelayanan (kependudukan/perijinan) tidak terlalu banyak. Kenyataannya pada saat pengajuan RENJA sesuai kondisi lapangan pengajuan masyarakat melebihi target rencana.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tambakromo

2.4.1 Analisis RENSTRA Perangkat Daerah terhadap tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Tambakromo

Kecamatan Tambakromo merupakan Perangkat Daerah yang termasuk dalam urusan penunjang kewilayahan, dimana urusan tersebut berfungsi menunjang pelayanan masyarakat yang mendukung keberhasilan visi dan misi kepala daerah untuk 5 (lima) tahun mendatang. Kecamatan Tambakromo memberikan dukungan terhadap Misi I untuk urusan ketenteraman, ketertiban umum, Misi III untuk pemberdayaan masyarakat dan Desa, Misi IV untuk perencanaan, dan Misi VI untuk Penanaman modal. Dari analisa RENSTRA Perangkat Daerah dengan urusan diatas mempunyai kesamaan sasaran dalam mendukung tujuan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun, capaian sasaran yang hampir sama secara tidak langsung juga merupakan tanggungjawab Kecamatan Tambakromo dalam memberikan kontribusi capaian kinerja terhadap perangkat daerah tersebut, kinerja sasaran meliputi :

- 1) Cakupan petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten dengan target capaian akhir 88%
- 2) Prosentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dengan target capaian akhir 99%
- 3) Prosentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD dengan target capaian akhir 100%
- 4) Lama Proses Perizinan dengan target capaian akhir 3 hari
- 5) Persentase Surat Keterangan Pindah Datang dengan target capaian akhir 100%
- 6) Persentase Kepemilikan KK dengan target capaian akhir 100%
- 7) Persentase Kepemilikan KTP dengan target capaian akhir 95%

Sasaran kecamatan merupakan turunan dari tujuan RPJMD dan selaras dengan sasaran perangkat daerah serta adanya kesamaan program. dari hal tersebut dapat analisa permasalahan di kecamatan terhadap sasaran OPD sehingga diketahui tantangan dan peluang yang ada sebagaimana Tabel II.14 berikut :

Tabel II.14
Analisa Untuk Tantangan dan Peluang

NO	ANALISA RENSTRA PD		TANTANGAN	PELUANG
	KINERJA SASARAN PD	MASALAH KECAMATAN		
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten	Masih kurangnya bentuk pelayanan petugas LINMAS terhadap jumlah masyarakat yang harus dilayani	Potensi pengaruh pelanggaran kamtibmas yang cukup tinggi dari luar Kecamatan Tambakromo yang mampu mempengaruhi masyarakat	Adanya Sinergitas dengan SATPOL yang lebih baik dan berkesinambungan dalam hal pembinaan LINMAS
2	Prosentase lembaga kemasyarakatan desa	1. LPMD di Desa masih banyak yang tidak diberdayakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan desa, sehingga mempengaruhi pembangunan yang ada dan berdampak pada lingkungan serta mempengaruhi Peningkatan produktivitas ekonomi desa, karena pemberdayaan	1. Peningkatan kapasitas LPMD serta adanya ketentuan yang mengharuskan desa memanfaatkan fungsi LPMD 2. Kondisi perekonomian yang belum stabil secara umum di lingkup wilayah Kabupaten Pati	1. Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa 2. DISPERMADES mempunyai target kinerja Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa 1. Adanya Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dari DISPERMADES

NO	ANALISA RENSTRA PD		TANTANGAN	PELUANG
	KINERJA SASARAN PD	MASALAH KECAMATAN		
		2. Kurang berfungsinya koordinasi yang dilaksanakan oleh RT/RW terhadap permasalahan lingkungan di masyarakat	1. Status penduduk sebagai pendatang dan tidak menetap menghambat terjalannya koordinasi warga 2. Kesejahteraan yang sesuai bagi koordinator ditingkat terendah (RT/RW) belum ada perhatian/kebijakan dari pemerintah	2. Peningkatan BUMDES merupakan target program dari DISPERMADES merupakan peluang bagi ekonomi desa dalam peningkatan omzet Adanya regulasi yang mengatur tentang kependudukan
		1. Masih banyak PKK dan Karang Taruna desa yang tidak berjalan/bergerak secara rutin	1. Manfaat dan peran penyamaan gender belum merata	1. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan menjadi salah satu program dari DISPERMADES

NO	ANALISA RENSTRA PD		TANTANGAN	PELUANG
	KINERJA SASARAN PD	MASALAH KECAMATAN		
		2. Belum maksimalnya penyelenggaraan Posyandu di desa	Peningkatan kapasitas dan pemahaman Kader posyandu di desa terkait Tugas pokok dan fungsi posyandu	1. Adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan posyandu dengan cara pengintegrasian berbagai kegiatan yang ada di masyarakat 2.
3	Prosentase hasil musrenbang yang dapat ditampilkan dalam RKPD	1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang Desa 2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang Kecamatan	1. Definisi operasional tentang program/kegiatan di perangkat daerah dirumuskan lebih jelas 1. Ketatnya proses verifikasi usulan kecamatan oleh OPD pengampu kegiatan	1. Adanya pembekalan pembelajaran bagi vasilitator penjangkaran usulan kegiatan 1. Adanya program Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) dalam RKPD
4	Prosentase realisasi capaian kinerja RKPD	Keterisian Data monografi kecamatan belum maksimal terpenuhi dan validasi data belum semuanya dapat pertanggungjawabkan	Banyaknya penambahan/penyempurnaan data yang sering terjadi sebagai suatu kebijakan	1. Tersedianya base data dari BAPPEDA dan DISKOMINFO yang dapat dijadikan acuan data 2. Terbitnya regulasi Permendagri tentang satu data indonesia

NO	ANALISA RENSTRA PD		TANTANGAN	PELUANG
	KINERJA SASARAN PD	MASALAH KECAMATAN		
5	Lama Proses Perizinan	Belum optimalnya pelayanan permohonan perijinan	Proses perizinan yang menerapkan sistem aplikasi	Adanya pelimpahan kewenangan pelayanan perijinan dari pemerintah daerah
6	Persentase Surat Keterangan Pindah Datang, KK dan KTP	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan	Ketersediaan bahan cetak (KTP, KK) yang terbatas dan lamanya pengadaan bahan Hak cetak saat ini ada di Disdukcapil,	Adanya pelimpahan kewenangan dari dari PEMDA Pati terkait Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP

Dari analisis diatas dapat dilihat tantangan dan peluang yang timbul dari permasalahan yang ada sebagai faktor dari luar sesuai dengan kondisi saat ini.

2.4.2 Analisis KLHS Terhadap Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Analisa Kecamatan Tambakromo terhadap KLHS dilihat dari aspek sosial yaitu kemiskinan akibat distribusi pendapatan kurang merata dapat dirumuskan tantangan dan peluang yang ada seperti pada tabel berikut :

Tabel II.15

Analisis KLHS Terhadap Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

No.	ISU KLHS	Program Kecamatan	Tantangan	Peluang
	Adanya kemiskinan akibat distribusi pendapatan kurang merata	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	1. Ketentuan yang mengharuskan desa memanfaatkan fungsi LPMD 1. Pemerataan pembangunan penunjang perekonomian	1. Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa 2. DISPERMADES mempunyai target kinerja Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa
		Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Adanya Pengawasan dan evaluasi terhadap masa berlaku perizinan dari OPD terkait	Pelimpahan kewenangan terkait pelayanan perijinan di kecamatan

Tantangan tersebut diatas akan menjadi masukan dalam penentuan isu strategis dan peluang yang ada akan menjadi usulan dalam perumusan strategi pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor – faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tambakromo

Kecamatan Tambakromo sesuai tugas dan fungsinya mengampu 4 (empat) misi sebagai bentuk dukungan kepada kepala daerah dalam menyelesaikan visi dan misi-nya. Misi yang terjemahkan dalam tujuan sudah menjadi ketetapan dalam RPJMD Kabupaten Pati, dari tujuan tersebut secara alur perencanaan diturunkan kedalam sasaran, strategi dan arah kebijakan menggunakan kerangka logis (cascading). Hasil dari alur perencanaan tersebut akan dilihat permasalahan yang ada sebagai berikut :

Tabel III.1

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya Poskamling yang aktif dan masih kurangnya pelayanan anggota LINMAS kepada masyarakat	Rasio Poskamling dalam satu desa masih kurang dan rasio anggota LINMAS terhadap masyarakat masih belum memenuhi	Belum optimalnya koordinasi serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat
2	Masih rendahnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan	Belum aktifnya LPMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW, Posyandu di desa	Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL),		
3	Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	<p>1. Penyaluran rastra, PKH kepada masyarakat desa yang membutuhkan masih kurang tepat, cepat dan efektif</p> <p>2. Pemerataan penyaluran bantuan keagamaan belum maksimal</p>	<p>1. Rendahnya koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dalam penanggulangan kemiskinan diwilayah kecamatan</p> <p>1. Kurangnya koordinasi dalam penanganan masalah keagamaan diwilayah kecamatan</p>
4	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	Pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat belum sepenuhnya memuaskan	Lebih rendah/sedikit dokumen kependudukan yang dikeluarkan dibandingkan permintaan yang masuk
5	Belum optimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan	Masih rendahnya keterisian data dan validasi data monografi kecamatan serta profil kecamatan	Belum maksimalnya koordinasi pemetaan, pengumpulan dan verifikasi data yang dibutuhkan kecamatan dalam penyusunan monografi dan profil
6	Sedikitnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan tertampung dalam Musrenbang Kabupaten	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti dan menghadiri Musrenbang tingkat Desa serta Musrenbang tingkat Kecamatan	Belum pahamnya masyarakat akan kebutuhan yang prioritas dan batasan – batasan kewenangan untuk menjadi usulan dalam musrenbang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Masih sedikitnya usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghadiri, mengikuti dan mengusulkan kebutuhan sesuai skala prioritas pada Musrenbang tingkat Desa dan Musrenbang tingkat Kecamatan	Belum pahamnya masyarakat akan kebutuhan yang menjadi prioritas wilayahnya Belum pahamnya masyarakat terkait OPD yang menangani usulan mereka dan batasan – batasan kewenangan yang bisa diusulkan
7	Belum semua desa mempunyai administrasi pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang diberlakukan	Laporan keuangan desa masih banyak yang tidak tepat waktu dan belum semua desa menyusun laporan keuangan sesuai standar pelaporan	Belum maksimalnya pembinaan dan pendampingan pengelolaan administrasi keuangan desa yang diberikan
8	Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu	Masih rendahnya sistem/bentuk pelayanan perizinan kepada masyarakat	Masih rendah/lebih sedikit dokumen izin yang dikeluarkan dibandingkan permintaan perizinan yang ada

Dari tabel diatas dapat dilihat seberapa banyak permasalahan yang muncul dari misi yang didukung oleh kecamatan Tambakromo antara lain masalah pokok yang mencapai 8 masalah, masalah mencapai 10 masalah, dan akar masalah sebanyak 11 masalah.

Permasalahan yang ada akan didukung oleh data sebagai dasar adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tambakromo. Data pendukung terbagi dalam tiga area yaitu data masalah pokok berisi data pembentuk dari indikator kinerja (sasaran), data masalah

berisi data pembentuk dari indikator kinerja (program) dan akar masalah yang merupakan data hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Tambakromo, data dukung ditampilkan sebagai berikut :

Tabel III.2
Data Dukung Masalah Pokok

NO.	POKOK MASALAH	SATUAN	DATA SESUAI KEADAAN	DATA SESUAI KEADAAN
			2018	2019
1.	Jumlah pos kamling di Kecamatan Tambakromo	Pos	78	78
2.	Jumlah anggota linmas di Kecamatan Tambakromo	Orang	389	389
3.	Jumlah lembaga masyarakat yang ada di Kecamatan Tambakromo	Lembaga	90	90
4.	Jumlah fakir/miskin di Kecamatan Tambakromo	Orang	6.384	5.613
5.	Jumlah usulan masyarakat (usulan kecamatan)	Usulan	33	33
6.	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan keseluruhan di Kecamatan Tambakromo	Dokumen	4.890	4.878
7.	Jumlah pelayanan perijinan keseluruhan di Kecamatan Tambakromo	Dokumen	83	81
8.	Jumlah data monografi kecamatan Tambakromo yang terisi	Data	89	89
9.	Jmlah desa di Kecamatan Tambakromo	Desa	18	18
10.	Jumlah penduduk Kecamatan Tambakromo	Orang	59.628	55.681
11.	Jumlah rumah ibadah se Kecamatan Tambakromo	Unit	310	310

Data pendukung pada tabel masalah pokok diatas merupakan metadata dari formulasi indikator kinerja sasaran yang sudah dirumuskan

dalam penghitungan untuk menentukan target, dimana data tersebut merupakan jenis data yang sifat sebagai elemen data.

Tabel III.3
Data Dukung Masalah

NO.	MASALAH	SATUAN	DATA SESUAI KEADAAN	
			2018	2019
	Jumlah seluruh LPMD = 18 desa	LPMD	18	18
	Jumlah PKK seluruhnya = 18 desa	PKK	18	18
	Jumlah karang taruna keseluruhan = 18 desa	Karang Taruna	18	18
	Jumlah RW se Kecamatan Tambakromo	RW	62	62
	Jumlah RT se Kecamatan Tambakromo	RT	340	340
	Jumlah posyandu se Kecamatan Tambakromo	Posyandu	18	18
	Jumlah PKH se Kecamatan Tambakromo	Orang	6.384	5.613
	Jumlah (rumah ibadah, takmir dll) yang seharusnya menerima bantuan keagamaan se Kecamatan Tambakromo	Unit	310	310
	jumlah masyarakat diundang yang hadir di musrenbang desa	Orang	35	38
	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah desa	Orang	45	45
	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah kecamatan	Orang	78	80
	Jumlah laporan keuangan desa se Kecamatan Tambakromo	Laporan	18	18

Data pendukung pada tabel masalah diatas merupakan metadata dari formulasi indikator kinerja program yang sudah dirumuskan dalam penghitungan untuk menentukan target, dimana data tersebut merupakan data yang sifatnya sebagai sub elemen data.

Tabel III.4**Data Dukung Akar Masalah**

NO.	AKAR MASALAH	SATUAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN
			2018	2019
	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin laki - laki	Orang	24.062	29.634
	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin perempuan	Orang	25.989	30.461
	Sex Ratio Penduduk	Rasio	92,59	97,29
	Kepadatan Penduduk	/Km2	1.173	1.408
	Jumlah Desa Berkembang	Desa	14	14
	Jumlah Desa Maju	Desa	4	4
	Jumlah Aparat Linmas aktif	AParat	235	265
	Jumlah Aparat Linmas tidak aktif	AParat	154	124
	Jumlah Pos Kamling aktif	Pos	48	51
	Jumlah Pos Kamling tidak aktif	Pos	30	27
	Jumlah Karang Taruna (KT) aktif	Karang Taruna	7	9
	Jumlah Karang Taruna (KT) tidak aktif	Karang Taruna	11	9
	Jumlah PKK Aktif **	PKK	14	15
	Jumlah PKK Tidak Aktif **	PKK	4	3
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Aktif**	Lembaga	6	9
	Lembaga	Lembaga	12	9

NO.	AKAR MASALAH	SATUAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN
			2018	2019
	Pemberdayaan Masyarakat Desa Tidak Aktif**			
	Jumlah RW aktif	RW	12	15
	Jumlah RW tidak aktif	RW	50	47
	Jumlah RT aktif	RT	269	290
	Jumlah RT tidak aktif	RT	71	50
	Jumlah Posyandu aktif	Posyandu	13	14
	Jumlah Posyandu tidak aktif	Posyandu	5	4
	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif		40	45
	Jumlah lembaga kemasyarakatan tidak aktif		50	45
	Jumlah fakir/miskin penerima bantuan sesuai daftar penerima RASTRA (rastra, PKH)		6.384	5.613
	Jumlah penerima bantuan keagamaan sesuai daftar penerima		310	310
	Jumlah usulan masyarakat (usulan kecamatan) yang terealisasi dalam RKPD		3	3
	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu yang terlayani		4890	4878
	Jumlah pelayanan perijinan tepat waktu yang terlayani		83	81
	Jumlah keterisian data monografi kecamatan		89	89
	Jumlah keterisian data profil desa		89	89
	Jumlah desa yang administrasi laporan		17	17

NO.	AKAR MASALAH	SATUAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN
			2018	2019
	pengelolaan keuangan desa tepat waktu			
	Jumlah desa yang administrasi laporan pengelolaan keuangan desa yang sudah tertib dan sesuai standar		16	16
	Jumlah Masjid se Kecamatan Tambakromo		64	64
	Jumlah Langgar/Mushola se Kecamatan Tambakromo		276	276
	Jumlah Surau se Kecamatan Tambakromo		0	0
	Jumlah Gereja Kristen se Kecamatan Tambakromo		4	4
	Jumlah Gereja Katolik se Kecamatan Tambakromo		0	0
	Jumlah Pura se Kecamatan Tambakromo		0	0
	Jumlah Kuil se Kecamatan Tambakromo		0	0
	Jumlah Vihara Kecamatan Tambakromo		0	0
	Jumlah Klenteng se Kecamatan Tambakromo		0	0

Data pendukung pada tabel akar masalah diatas merupakan metadata dari hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi

dasar dalam menghitung realisasi kinerja dari target yang sudah direncanakan. data sifatnya sebagai sub elemen data.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pati periodetahun 2017-2022 adalah :

“MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK.”

Visi tersebut diterjemahkan dengan 8 (delapan misi) untuk mewujudkan sebagai berikut :

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pati periodetahun 2017-2022:

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Ketercapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib didukung oleh Kecamatan Tambakromo, diselaraskan dengan permasalahan pelayanan kecamatan yang telah dirumuskan pada sub bab 3.1 diatas untuk dasar penelaahan guna mendapatkan faktor – faktor penghambat dan pendukung yang ada di Kecamatan Tambakromo :

Tabel III.5
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan
Tambakromo Kab. Pati Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi I Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.	Masih rendahnya Poskamling aktif dan anggota Linmas aktif	Kurang pedulinya masyarakat terhadap manfaat poskamling Belum optimalnya pelayanan LINMAS sesuai tugas dan fungsinya di Kecamatan Tambakromo	Kebijakan Kecamatan Tambakromo dalam pengaktifan kembali poskamling Adanya nggaran pembinaan LINMAS dari desa untuk peningkatan kapasitas
2	MISI III Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan	Masih rendahnya Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan lingkungan di desa	Belum memahaminya masyarakat akan arti, makna dan manfaat Indeks Ketahanan ekonomi, lingkungan dan social.	Adanya tenaga pendamping yang membantu, memfasilitasi desa dalam membangun/meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mencapai predikat desa mandiri
		Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Data penerima bantuan sosial yang kurang valid Belum optimalnya pemutahhiran	Labelisasi penerima bantuan yang bisa memperbarui penerima bansos Adanya sistem Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			data masyarakat fakir dan miskin	(SIKS - NG) yang sudah diterapkan di desa pada tahun 2019 di setiap desa
3	MISI IV Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya dokumen kependudukan	Penggratisan biaya pengelolaan dokumen kependudukan Pelayanan kependudukan yang sudah bisa dilakukan/menjadi kewenangan oleh kecamatan
		Belum optimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan	Pandangan sebelah mata terhadap pentingnya data dan informasi guna penyusunan monografi dan profil kecamatan	Penyusunan perencanaan kecamatan yang sudah berdasarkan pada data dan informasi Peningkatan SDM kecamatan terhadap pengelolaan data dan informasi
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten Masih sedikitnya usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	Masyarakat dalam pengusulan masih bersifat kewilayahan (kepentingan kelompok) belum menerapkan prioritas kebutuhan Petugas Fasilitator kecamatan belum optimal dalam	Adanya fasilitasi penjangkaran aspirasi masyarakat dan pelaksanaan musrenbang oleh kecamatan Kecamatan ikut mendukung dan membantu dalam penerapan sistem Pagu indikator kecamatan (PIK)

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			memberikan pendampingan mengarahkan, dan mengkondisikan usulan masyarakat	
		Belum semua desa mempunyai administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	SDM administrasi pengelolaan keuangan desa yang kurang handal	Adanya fasilitasi kecamatan dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan tenaga administrasi pengelolaan keuangan desa
4	MISI VI Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.	Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya izin usaha Banyaknya ijin usaha yang masuk tidak sebanding dengan jumlah tenaga di kecamatan	Penggratisan biaya pengurusan izin usaha selain IMB Adanya sistem ijin usaha yang terintegrasi

Dari hasil telaahan tersebut dapat dilihat adanya faktor - faktor penghambat dan pendorong dari dalam Kecamatan Tambakromo sesuai dengan kondisi wilayah dan sosial kemasyarakatan.

Ketercapaian Program Kepala daerah yang menjadi kewajiban Kecamatan Tambakromo untuk mendukungnya sesuai dengan keselarasan program di kecamatan sebagaimana berikut :

1. **Program masyarakat yang tertib, bersosial dan bermartabat** didukung oleh Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
2. **Program pemberdayaan masyarakat miskin** didukung oleh Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa dan Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan.
3. **Program pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM** yang kompeten didukung oleh Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program Pengembangan data/Informasi, Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa.
4. **Program investasi daerah** didukung oleh program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

3.3 Telaahan RENSTRA Perangkat Daerah

Telaahan terhadap RENSTRA Perangkat Daerah yang searah atau didukung oleh Kecamatan Tambakromo ada 5 (lima) perangkat daerah kabupaten, telaah berfungsi untuk mencari factor – factor penghambat dan pendorong dari dalam Kecamatan itu sendiri. Perangkat daerah juga merupakan pengampu urusan yang wajib menyusun RENSTRA Perangkat Daerah, hasil dari perencanaan mereka ditelaah dengan batasan kesesuaian tujuan, sasaran dan program di Kecamatan Tambakromo sebagai berikut :

1. SATPOL PP :

Tujuan Persentase Penanganan Pelanggaran K3.

Sasaran Cakupan petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal dengan indikator Persentase Personil Linmas yang terlibat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

2. DISPERMADES :

Tujuan Indek Desa Membangun (IDM).

Sasaran Indek Ketahanan Sosial, Indek Ketahanan Ekonomi, Indek Ketahanan Lingkungan.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Prosentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif.

3. BAPPEDA :

Tujuan dari Persentase Realisasi Capaian RPJMD.

Sasaran Prosentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD dan Prosentase realisasi capaian kinerja RKPD.

Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Prosentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang Pemsosbud yang tertampung dalam Renja dan program Pengembangan Data/Informasi dengan indikator Prosentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan.

4. DPMPTSP :

Tujuan Pertumbuhan Investasi Daerah.

Sasaran Lama Proses Perizinan.

Program Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan indikator prosentase Kesesuaian Perizinan.

5. DISPENDUKCAPIL

Tujuan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Kependudukan.

Sasaran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pencatatan Sipil.

Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Peningkatan Kepemilikan KTP, Persentase Kepemilikan KK dan Persentase Keterangan Pindah Datang.

Dilihat dari sisi sasaran perangkat daerah dapat ditelaah sesuai kompetensi yang mampu dilaksanakan oleh Kecamatan Tambakromo sebagai bentuk dukungan guna ketercapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah saat periode RPJMD tahun 2017 – 2022, telaah sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel III.6
Telaah RENSTRA Perangkat Daerah**

NO.	SASARAN PD	PERMASALAHAN	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten	Kurang maksimalnya Rasio Poskamling dan rasio anggota Linmas	Kurang pedulinya masyarakat akan arti pentingnya	Adanya anggaran dari desa untuk membina anggota Linmas

NO.	SASARAN PD	PERMASALAHAN	PENGHAMBAT	PENDORONG
			poskamling dan Linmas	dan pengaktifan poskamling
2	Prosentase lembaga kemasyarakatan desa	Belum aktifnya LPMD, PKK, Karang taruna, RT/RW dan Posyandu di desa	Kurang antusiasme masyarakat dalam mengaktifkan lembaga desa Kurang nya peran yang diberikan oleh desa terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat	Adanya anggaran yang memadai untuk operasional lembaga desa Fasilitasi peningkatan kapasitas pengurus/anggota lembaga pemberdayaan masyarakat
3	Prosentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan Masih sedikit masyarakat yang memahami tata laksanaan dan ketentuan pengusulan kebutuhan masyarakat	Fasilitasi dari kecamatan terhadap pelaksanaan penjaringan dan musrenbang Penyediaan tenaga fasilitator oleh kecamatan Adanya pemilahan usulan prioritas untuk direalisasikan
	Persentase desa tertib administrasi pengelolaan keuangan	Belum semua desa mempunyai administrasi pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang diberlakukan	Kurangnya kompetensi SDM pengelola administrasi keuangan desa Sistem administrasi yang sudah aplikasi	Adanya Pendampingan/pelathan/bintek dalam penyelesaian proses administrasi keuangan
4	Lama Proses Perizinan	Belum maksimalnya pelayanan perizinan kepada masyarakat	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya izin	Penggratisan biaya pengurusan izin usaha skala kecil

NO.	SASARAN PD	PERMASALAHAN	PENGHAMBAT	PENDORONG
			usaha Kurangnya tenaga kecamatan untuk menunjang proses pelayanan di	selain IMB Kecamatan memiliki Kewenangan perijinan skala kecil Adanya sistem ijin usaha yang terintegrasi Sosialisasi kepada masyarakat terkait proses pelayanan perijinan dan manfaat perijinan
5	Persentase Surat Keterangan Pindah Datang, KK, dan KTP	Belum maksimalnya pelayanan surat keterangan pindah dating, pelayanan kartu keluarga, pelayanan kartu tanda penduduk kepada masyarakat	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya administrasi kependudukan Hasil dari pelayanan yang tidak langsung didapatkan oleh masyarakat karena hanya sebatas rekam data Tidak adanya alat cetak KTP di Kecamatan	Penggratisan biaya pengurusan surat pindah dating Kewenangan yang dimiliki kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan Adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait tertib administrasi kependudukan

Dari hasil telaah tersebut penghambat yang timbul dari dalam akan dijadikan salah satu acuan dalam penentuan isu strategis Kecamatan Tambakromo selain tantangan dari bab sebelumnya, dan pendorong

yang dimiliki akan dijadikan pedoman strategi dalam penyelesaian hambatan.

3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dari hasil telaah KLHS terhadap isu KLHS terkait aspek sosial dalam hal ini kemiskinan jika diselaraskan dengan program di Kecamatan Tambakromo dapat dilihat perumusan penghambat dan pendorong yang ada sebagai berikut :

Tabel III.7
Telaah KLHS terhadap Kecamatan Tambakromo

No.	Isu KLHS	Program Kecamatan	Penghambat	Pendorong
	Adanya kemiskinan akibat distribusi pendapatan kurang merata	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	<p>1. Belum sepenuhnya tugas dan fungsi LPMD diberdayakan oleh pihak desa</p> <p>1. Pembangunan yang tidak sepenuhnya melibatkan LPMD akan kurang selaras dengan kebutuhan dalam peningkatan ekonomi desa</p>	<p>1. Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa</p> <p>2. Adanya kinerja Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa dari Pemerintah Daerah</p>
		Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait proses perizinan usaha	Program peningkatan iklim investasi menjadi salah satu sasaran kecamatan dalam perencanaan

Hasil telaah KLHS terkait isu yang bisa ikut didukung penyelesaiannya oleh Kecamatan Tambakromo akan berguna sebagai penyumbang masukan dalam perumusan isu dan penentuan strategi yang akan diimplementasikan dalam program/kegiatan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan merupakan gabungan masalah masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lam. Penentuan isu – isu strategis tidak lepas dari adanya hasil analisis dan telaah pada Visi dan misi, RENSTRA OPD yang terkait dengan perencanaan Kecamatan Tambakromo dan RTWR, hasil analisis dan telaah yang dapat diambil adalah :

TABEL III.8
HASIL ANALISA, TELAHAH DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN

NO	PERMASALAHAN	TANTANGAN	PENGHAMBAT
1	Masih rendahnya Poskamling aktif dan anggota Linmas aktif	Potensi pengaruh pelanggaran kamtibmas yang cukup tinggi dari luar Kecamatan Tambakromo yang mampu mempengaruhi masyarakat	1. Kurang pedulinya masyarakat terhadap manfaat poskamling dan fungsi dari LINMAS 2. Belum optimalnya pelayanan LINMAS sesuai tugas dan fungsinya di Kecamatan Tambakromo
2	Masih rendahnya Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan lingkungan di desa	1. Peningkatan kapasitas LPMD serta adanya ketentuan yang mengharuskan desa memanfaatkan fungsi LPMD 2. Pemerataan pembangunan	1. Belum memahaminya masyarakat akan arti, makna dan manfaat Indeks Ketahanan ekonomi, lingkungan dan social untuk mencapai/menjadi desa mandiri 2. Kurang antusiasme masyarakat dalam mengaktifkan lembaga

NO	PERMASALAHAN	TANTANGAN	PENGHAMBAT
		<p>penunjang perekonomian</p> <p>3. Kondisi perekonomian yang belum stabil secara umum di lingkup wilayah Kabupaten Pati</p> <p>4. Pembangunan yang tidak sepenuhnya melibatkan LPMD akan kurang selaras dengan kebutuhan dalam peningkatan ekonomi desa</p> <p>5. Status penduduk sebagai pendatang dan tidak menetap menghambat terjalinnya koordinasi warga</p> <p>6. Kesejahteraan yang sesuai bagi koordinator ditingkat terendah (RT/RW) belum ada perhatian/kebijakan dari pemerintah</p> <p>7. Manfaat dan peran penyamaan gender belum merata</p> <p>8. Peningkatan kapasitas dan pemahaman Kader posyandu di desa terkait Tugas pokok dan fungsi posyandu</p>	<p>desa</p> <p>3. Kurangnya peran serta yang diberikan/dimanfaatkan oleh desa terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat</p>

NO	PERMASALAHAN	TANTANGAN	PENGHAMBAT
	Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Verifikasi akhir pendataan masyarakat miskin oleh pemerintah pusat	1. Data penerima bantuan sosial yang kurang valid 2. Belum optimalnya pemutakhiran data masyarakat fakir dan miskin
	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	Ketersediaan bahan cetak (KTP, KK) yang terbatas dan lamanya pengadaan bahan Hak cetak saat ini ada di Disdukcapil,	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya dokumen kependudukan Hasil dari pelayanan yang tidak langsung didapatkan oleh masyarakat karena hanya sebatas rekam data Tidak adanya alat cetak KTP di Kecamatan
	Belum optimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan	Banyaknya penambahan data dan perubahan yang sering diamanatkan oleh pemerintahan daerah, provinsi maupun pusat	Pandangan sebelah mata terhadap pentingnya data dan informasi guna penyusunan monografi dan profil kecamatan
	Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten	1. Definisi operasional tentang program/kegiatan di perangkat daerah dirumuskan lebih jelas 1. Ketatnya proses verifikasi usulan kecamatan oleh OPD pengampu kegiatan	Masyarakat dalam pengusulan masih bersifat kewilayahan (kepentingan kelompok) belum menerapkan kebutuhan prioritas Petugas Fasilitator kecamatan belum optimal dalam memberikan pendampingan mengarahkan, dan mengkondisikan usulan masyarakat
	Belum semua desa mempunyai	Sistem pengelolaan keuangan dengan aplikasi	Kurangnya kompetensi SDM pengelola

NO	PERMASALAHAN	TANTANGAN	PENGHAMBAT
	administrasi pengelolaan keuangan yang tertib		administrasi pengelolaan keuangan desa
	Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu	<p>Proses perizinan yang menerapkan sistem aplikasi</p> <p>Adanya Pengawasan dan evaluasi terhadap masa berlaku perizinan dari OPD terkait</p> <p>Proses perizinan yang menerapkan sistem aplikasi</p>	<p>1. Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya izin usaha</p> <p>2. Banyaknya ijin usaha yang masuk tidak sebanding dengan jumlah tenaga di kecamatan</p> <p>3. Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya izin usaha</p> <p>4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait proses perizinan usaha</p> <p>5. Kurangnya tenaga di kecamatan untuk menunjang proses pelayanan</p>

Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan sub isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan antara lain:

- 1) Kondusivitas pengurusan perizinan (misi vi)
- 2) Derajat Keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi (misi I)
- 3) kesejahteraan selanjutnya adalah Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan. Kelompok rentan dapat merujuk pada kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), keluarga rentan miskin, kelompok disabilitas, dan kelompok rentan karena relasi gender yang belum setara dan adil. (misi III)

- 4) Perluasan jenis layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang responsif berbasis teknologi informasi (*e-Government*)(misi IV administrasi kependudukan)
- 5) Isu transparansi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan berbasis TI dengan data yang andal dan terbarukan(misi IV perencanaan dan data)

Dari hasil penyelarasan tersebut tersirat adanya kesamaan permasalahan di Kecamatan Tambakromo dengan sub permasalahan daerah, sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis yang nantinya akan dijabarkan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Perumusan isu – isu strategis untuk Kecamatan Tambakromo adalah sebagai berikut :

1. Isu reformasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Tambakromo serta koordinasi dengan dinas terkait dalam mempercepat proses pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat;
2. Isu terkait penciptaan kondisi keamanan, ketenteraman, ketertiban wilayah kecamatan dalam mendukung peningkatan perekonomian dan investasi;
3. Isu terkait peningkatan kualitas pembangunan (Kecamatan dan desa) serta lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
4. Isu terkait penguatan kelompok rentan dan penyetaraan gender.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tambakromo

Tujuan Kecamatan Tambakromo yang diambil merupakan konsistensi terhadap RPJMD Kabupaten Pati periode tahun 2017 – 2022, dimana tujuan RENSTRA diambil dari sasaran RPJMD, perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Tambakromo dijabarkan dalam tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu :

- 1) Misi I yaitu meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal. Tujuan terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan.

Sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

- 2) Misi III yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Tujuan meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

Sasaran meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dan terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat

- 3) Misi IV yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik.

Tujuan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan, terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa.

- 4) Misi VI yaitu meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.

Tujuan terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan.

Penjabaran tujuan dan sasaran dari visi dan misi dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunakan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Tambakromo selama lima tahun akan diterapkan dalam perencanaan RENSTRA sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel IV.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TAMBAKROMO**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi I : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal								
1	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian social dan bermartabat di wilayah Kecamatan		Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	100 %	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Persentase pos kampling aktif	60%	63%	66%	70%	75%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase anggota Linmas aktif	60%	65%	70%	75%	77%
Misi III : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan								
2	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.		Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan	0.660	0.680	0.685	0.690	0.700
			Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.700	0.715	0.730	0.745	0.760
			Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.600	0.615	0.630	0.645	0.660
			Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.700	0.715	0.730	0.745	0.760
		Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.		100%	100%	100%	100%
Misi IV : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik								

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan		Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan terhadap pelayanan kependudukan	60%	65%	70%	75%	80%
			Persentase Realisasi Capaian RKPDes	65%	70%	75%	80%	85%
			Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPDes Kabupaten	6%	8%	9%	11%	12%
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	60%	65%	70%	75%	80%
			Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPDes kabupaten	6%	8%	9%	11%	12%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	89%	90%	91%	92%	93%
Misi VI : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri								
4	Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan		Pertumbuhan pemohon Paten	60	65	68	70	72
		Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100 %	100%	100%	100%	100%

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Tambakromo, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2018 – 2022.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh perangkat daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dalam pencapaian pembangunan daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan.

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tambakromo

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, serta selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, perencanaan, monitoring, serta evaluasi. Berdasarkan peluang dan pendorong yang didapatkan dari analisa pada Bab II dan telaah pada Bab III terhadap permasalahan yang ada akan dicantumkan pada tabel berikut:

Tabel V.1
Peluang dan Pendorong penentuan Strategi dan Arah Kebijakan

NO	PELUANG	PENDORONG
1	Adanya Sinergitas dengan SATPOL yang lebih baik dan berkesinambungan dalam hal pembinaan LINMAS	Adanya anggaran dari desa untuk membina anggota Linmas dan pengaktifan poskamling
2	1) Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa 2) DISPERMADES mempunyai target kinerja Peningkatan	1) memfasilitasi desa dalam membangun/meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mencapai predikat desa mandiri 2) Anggaran yang memadai untuk

NO	PELUANG	PENDORONG
	<p>swadaya masyarakat dalam membangun desa</p> <p>3) Adanya Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dari DISPERMADES</p> <p>4) Peningkatan BUMDES merupakan target program dari DISPERMADES merupakan peluang bagi ekonomi desa dalam peningkatan omzet</p> <p>5) Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan menjadi salah satu program dari DISPERMADES</p> <p>6) Lembaga kemasyarakatan desa yang aktif merupakan target kinerja bagi DISPERMADES</p> <p>7) Adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan posyandu dengan cara pengintegrasian berbagai kegiatan yang ada di masyarakat</p>	<p>operasional lembaga desa</p> <p>3) Fasilitasi peningkatan kapasitas pengurus/anggota lembaga pemberdayaan masyarakat</p> <p>4) Labelisasi penerima bantuan yang bisa memperbarui penerima bansos</p> <p>5) Adanya sistem Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS – NG) yang sudah diterapkan di desa pada tahun 2019 di setiap desa</p>
3	<p>1) Adanya pembekalan pembelajaran bagi fasilitator penjangkaran usulan kegiatan</p> <p>2) Adanya program Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) dalam RKPD</p> <p>3) Tersedianya base data dari BAPPEDA dan DISKOMINFO yang dapat dijadikan acuan data</p> <p>4) Terbitnya Permendagri tentang satu data indonesia</p>	<p>1) Adanya fasilitasi penjangkaran aspirasi masyarakat dan pelaksanaan musrenbang oleh kecamatan</p> <p>2) Kecamatan ikut mendukung dan membantu dalam penerapan sistem Pagu indikator kecamatan (PIK)</p> <p>3) Adanya fasilitasi kecamatan dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan tenaga administrasi pengelolaan keuangan desa</p> <p>4) Penyusunan perencanaan kecamatan yang sudah berdasarkan pada data dan informasi</p> <p>5) Peningkatan SDM kecamatan terhadap</p>

NO	PELUANG	PENDORONG
		pengelolaan data dan informasi 6) Penyediaan tenaga fasilitator oleh kecamatan 7) Adanya pemilahan usulan prioritas untuk direalisasikan
	Sistem keuangan yang terintegrasi	Adanya Pendampingan/pelathan/bintek dalam penyelesaian proses administrasi keuangan
4	1) Pelimpahan kewenangan dari PEMDA Pati terkait Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro 2) Kesesuaian Perizinan merupakan prioritas kinerja program dari DPMPTSP	1) Penggratisan biaya pengurusan izin usaha selain IMB 2) Adanya sistem ijin usaha yang terintegrasi 3) Pelayanan kependudukan yang sudah bisa dilakukan/menjadi kewenangan oleh kecamatan 4) Kewenangan yang dimiliki kecamatan dalam pelayanan perijinan skala kecil 5) Sosialisasi kepada masyarakat terkait proses pelayanan perijinan dan manfaat perijinan 6) Program peningkatan iklim investasi menjadi salah satu sasaran kecamatan dalam perencanaan
5	Adanya pelimpahan kewenangan dari dari PEMDA Pati terkait Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP	1) Penggratisan biaya pengurusan surat pindah dating 2) Kewenangan yang dimiliki kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan 3) Adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait tertib administrasi kependudukan

Dari peluang dan pendorong yang ada dengan memedomani alur perencanaan yang telah disusun dalam cascading perencanaan lima tahunan Kecamatan Tambakromo akan dapat ditentukan strategi dan arah kebijakan

dari penjabaran tujuan dan sasaran. Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tambakromo dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel V.2

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik

Misi 1 : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Peningkatan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di wilayah kecamatan	1. Peningkatan koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum 2. Pemberdayaan dan penguatan peran Linmas.
Misi 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	1. Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam lembaga kemasyarakatan 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan	1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa 2. Pengikutsertaan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan sesuai tugas dan fungsinya
	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	1. Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	1. Percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra dan PKH)

		Wilayah Kecamatan	dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.
		2. Peningkatan koordinasi bantuan keagamaan penunjang ibadah masyarakat di wil. Kecamatan	2. Pelaksanaan evaluasi bagi masyarakat penerima bantuan kemiskinan 3. Optimalisasi dan pengawasan pelaksanaan penyaluran bantuan keagamaan
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan	Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan kecamatan di segala aspek	1. Peningkatan SDM pelayanan administrasi kependudukan 2. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	1. Pengembangan sistem data dan informasi 2. Optimalisasi sistem dan program perencanaan pembangunan	1. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data dan informasi 2. Peningkatan keterisian data monografi dan profil kecamatan 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan 2. Perumusan kegiatan sesuai kewenangan dan

			kemampuan OPD dalam melaksanakan kegiatan
	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Peningkatan system dan tata kelola administrasi Keuangan Desa	1. Peningkatan SDM pengelola administrasi keuangan desa 2. Optimalisasi standar pelaporan administrasi keuangan desa
Misi 6 : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat diwilayah kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan	Optimalisasi pelayanan dan system pelayanan perizinan terpadu di Kecamatan	1. Peningkatan SDM pelayanan perijinan 2. Pelayanan gratis kepada masyarakat yang mengajukan perizinan

Hasil perumusan tujuan, sasaran , startegi dan arah kebijakan yang disertai target kinerja akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan dengan disertai penganggaran, akan dipedomani Kecamatan Tambakromo dalam penyusunan perencanaan tahunan/RENJA perangkat daerah karena hal tersebut merupakan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan 5 (lima) tahunan , instrumen kebijakan tersebutberisi beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tambakromo untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan dukungan alokasi anggaran sebagai bentuk legalitas atas diusulkan/dilaksanakannya kegiatan tersebut pada RENJA perangkat daerah. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk merialisasikan arah kebijakan yang sudah ditentukan, oleh karena itu Program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tambakromo Kabupaten Patitercantum dalamTabel VI.1 di bawah ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati
Tahun 2018-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. (000)			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
NON URUSAN																				
		4.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi yang terlayani	100%	100%	186.393	100%	233.066	100%	242.320	100%	276.850	100%	292.550	100%	1.231.179	Kecamatan Tambakromo		
		4.08.4080.2.01.001	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani	390 surat	462	1.950	475	2.400	485	2.640	496	2.800	505	3.000	2.423	12.790	Kecamatan Tambakromo		
				Jumlah Arsip dinamis	0 Jenis	0		0		0		7		7		7				
		4.08.4080.2.01.002	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening telepon air dan listrik yang dibayarkan	36 rekening	60	21.000	60	30.000	60	34.000	60	36.500	60	38.500	300	160.000	Kecamatan Tambakromo		
				Jumlah layanan publik berbasis e-gov	0 Paket	0		0		0		1		1		2				

Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4.08.4080.2.01.006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	9 kendaraan dinas	9	2.450	10	2.600	11	2.860	12	3.000	12	3.600	54	14.510	Kecamatan Tambakromo	
		4.08.4080.2.01.008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa layanan umum	3 unit	3	3.750	3	4.250	3	4.675	3	4.750	3	4.900	15	22.325	Kecamatan Tambakromo	
		4.08.4080.2.01.010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	50 rim	60	11.700	61	12.600	61	10.500	61	10.750	61	12.000	304	57.550	Kecamatan Tambakromo	
					45 pak	45		51		51		51		51		249			
					2 rol	2		2		2		2		2		10			
					304 buah	304		404		404		404		404		1.920			
					50 botol	50		80		80		80		80		370			
					75 dos	75		95		95		95		95		455			
		4.08.4080.2.01.011	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	29800 lembar	30000	6.510	30000	7.200	30000	7.920	40000	8.500	42000	9.000	172.000	39.130	Kecamatan Tambakromo	
					0 meter			40		40		60		75					

Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																215			
		4.08.4080.2.01.012	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	110 buah	110	3.300	69	3.350	69	3.575	69	3.850	69	4.500	386	18.575	Kecamatan Tambakromo	
					0 meter	0		151		151		151		151		604			
					0 pak	0		5		5		5		5		20			
		4.08.4080.2.01.013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 buah	0	0	0	0	8	2.150	10	2.500	10	2.500	28	7.150	Kecamatan Tambakromo	
		4.08.4080.2.01.015	Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24 eksemplar	24	3.250	24	3.250	24	3.250	24	3.450	24	3.600	120	16.800	Kecamatan Tambakromo	
		4.08.4080.2.01.016	Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah bahan logistik kantor	3900 liter	3.900	41.123	4.032	44206	4.232	46.500	4.532	56.750	4.032	47.500	20.728	236.079	Kecamatan Tambakromo	
					0 dos	30		30		30		30		30		150			
					0 galon	90		90		90		100		100		470			
					0 kg	0		25		25		25		25		100			
					0 pak	0		36		36		36		36		144			

Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4.08.4080.2.01.018	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah	12 notulen rapat	36	41.500	36	49.960	36	51.000	36	55.000	36	66.700	180	264.160	Kecamatan Tambakromo	
					303 laporan perjalanan	396		420		420		440		440		2.116			
		4.08.4080.2.01.019	Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah jasa layanan umum	2 orang/bulan (selama 12 bulan)	2	21.000	3	38.250	3	38.250	4	51.000	4	51.000	16	199.500	Kecamatan Tambakromo	
		4.08.4080.2.01.022	Kegiatan penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan PD	12 dokumen	12	28.860	12	35.000	12	35.000	12	38.000	12	45.750	60	182.610	Kecamatan Tambakromo	
				Jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 dokumen	12		12		12		12		12		60			
				Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12		12		12		12		12		60			

Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 dokumen	12		12		12		12		12		60			
		4.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam keadaan baik	65%	70 %	96.270	73 %	152.774	76 %	185.799	78 %	190.606	80%	224.415	80 %	849.864	Kecamatan Tambakromo	
		408.40802.02.005	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas Operasional /Lapangan	0 Unit	1	20.000	1	20.000	2	40.000	1	20.000	1	20.000	6	120.000	Kecamatan Tambakromo	
		408.40802.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnyaUnit	1	4.050	4	23485	4	25666	5	33.250	5	42.300	19	128.751	Kecamatan Tambakromo	
		408.40802.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnyaUnit	2	11.200	4	19717	3	21689	4	32500	4	44.000	17	129.106	Kecamatan Tambakromo	

Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		408.4 0802. 02.01 0	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebel	1 unit	20	7.000	30	13550	30	14905	2	16.554	2	19.800	84	71.809	Kecamatan Tambakromo	
		408.4 0802. 02.01 7	Pengadaan peralatan computer dan kelengkapannya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	2	11.000	3	13.550	3	14.905	3	16.700	3	20.613	14	76.768	Kecamatan Tambakromo	
		408.4 0802. 02.02 1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas camat	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	110 m2	110	10.560	120	13.500	135	14.500	148	16.500	150	17.500	663	72.560	Kecamatan Tambakromo	
		408.4 0802. 02.02 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	150 m2	250	15.000	150	14.400	160	15.840	170	16.600	170	17.800	900	79.640	Kecamatan Tambakromo	

Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		408.4 0802. 02.02 4	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	9 unit pemeliharaan	10	17.460	12	25.502	13	28.502	12	28.502	12	28.502	59	128.468	Kecamatan Tambakromo	
		408.4 0802. 02.02 6	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	unit pemeliharaan			3	1050	5	2100	6	2.400	6	3.000	20	8.550	Kecamatan Tambakromo	
		408.4 0802. 02.02 8	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	unit pemeliharaan			14	5.720	16	6.292	18	7.600	20	8.400	68	28.012	Kecamatan Tambakromo	
		408.4 0802. 02.02 9	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	...unit pemeliharaan			18	2300	14	1400	0	0	20	2.500	52	6.200	Kecamatan Tambakromo	

Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4.08.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang meningkat kedisiplinannya	88%	90 %	11.600	90 %	13.600	91 %	15.200	91 %	18.100	92%	20.800	92 %	79.300	Kecamatan Tambakromo	
		408.40802.03.002	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	26 stel	29	11.600	30	12.000	32	12.800	35	14.000	35	14.000	161	64.400	Kecamatan Tambakromo	
		408.40802.03.006	Kegiatan pembinaan disiplin ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Laporan	0	0	12	1.600	12	2.400	12	4.100	12	6.800	48	14.900	Kecamatan Tambakromo	
		4.08.06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan kinerja dan keuangan yang disajikan	100%	100 %	4.006	100 %	4.597	100 %	4.859	100 %	5.663	100 %	6.887	100 %	26.012	Kecamatan Tambakromo	
		408.40802.06.00	Penyusunan laporan capaian	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar	12 laporan	12	830	12	857	12	877	12	956	12	1.232	60	4.752	Kecamatan Tambakromo	

Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
						2018		2019		2020		2021		2022						
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		1	kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	realisasi kinerja PD															romo	
				Jumlah data kinerja yang terisi	18 Jenis data	18		18		18		18		18		18				
		408.4 0802.06.004	Penyusunanpelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1	1108	1	1.184	1	1.302	1	1.642	1	1.985	5	7.221	Kecamatan Tambakromo		
		408.4 0802.06.005	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan PD	2 dokumen	2	596	2	1.027	2	1.130	2	1.465	2	1.985	10	6.203	Kecamatan Tambakromo		
					4 lap evaluasi	4		4		4		4		4		20				
		408.4 0802.06.006	Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD	1 dokumen	1	1.472	1	1.529	1	1.550	1	1.600	1	1.685	10	7.836	Kecamatan Tambakromo		

Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah dokumen Perubahan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD	1 Dokumen	1		1		1		1		1		5			
		408.4 0802. 06.00 7	Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan SKPD	Jumlah laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan PD laporan	12	592	12	1.364	12	1500	12	1.875	12	2.020	60	7.351	Kecamatan Tambakromo	
		408.4 0802. 06.01 0	Penyusunan rencana strategis PD (Renstra) PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	2 dokumen					1	2500			1	2.500	2	5.000	Kecamatan Tambakromo	
Prioritas 1							298.269		404.037		448.178		491.219		544.652		2.186.355		
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
BIDANG URUSAN: FUNGSI KEWILAYAHAN (PEMERINTAHAN)																			

Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan				Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	100%	100 %	38.000	100 %	52.000	100 %	55.000	100 %	60.196	100 %	62.500	100 %	267.696	Kecamatan Tambakromo	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban			Persentase Poskamling Aktif	55%	58 %	38.000	60 %	52.000	63 %	55.000	68 %	60.196	72%	62.500	72 %	267.696		
				Persentase Linmas Aktif	53%	55 %		58 %		60 %		65 %		70%		70 %			
		4.08.16	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rasio Linmas	3,5	4,1	38.000	4,5	52.000	4,8	55.000	5	60.196	5,5	62.500	24	267.696	Kecamatan Tambakromo	
				Rasio Poskamling	0,03	0,03		0,03		0,033		0,03		0,04		0,04	-		

Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		408.4080 2.16.006	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan/ <i>paper brief</i> terkait koordinasi upaya penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	1 Laporan	12	38.000	12	52.000	12	55.000	12	60.196	12	62.500	60	267.696	Kecamatan Tambakromo	
Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayahkecamatan				Indeks Desa Membangun (IDM)	0.645	0.660	31.000	0.680	60.641	0.685	66.002	0.690	72.300	0.700	81.699	0.700	311.642	Kecamatan Tambakromo	
				Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan			Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.650	0.700	31.000	0.715	39.000	0.730	43.502	0.745	46.800	0.760	52.000	0.760	212.302		
				Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.550	0.600		0.615		0.630		0.645		0.660		0.660			
				Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.660	0.700		0.715		0.730		0.745		0.760		0.760			
		4.08.18	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase LPMD aktif	30%	40%	31.000	50%	39.000	60%	43.502	70%	46.800	75%	52.000	75%	212.302	Kecamatan Tambakromo	
				Persentase PKK desa aktif	80%	82%		85%		86%		88%		90%		90%			
				Persentase Karang Taruna aktif	40%	44%		48%		58%		60%		65%		65%			
				Persentase RT/RW aktif	70%	73%		76%		78%		79%		80%		80%			

Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
						2018		2019		2020		2021		2022						
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Persentase Posyandu aktif	75%	78 %		80 %		83 %		87 %		90%		90 %				
		408.4080 2.18.004	Koordinasikegiatanpemberdayaanmasyarakat	Jumlahlaporan/paper brief pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	12 laporan	12	31.000	12	39.000	12	43.502	12	46.800	12	52.000	60	212.302	Kecamatan Tambakromo		
	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat			Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	--%	--%	-	100 %	21.641	100 %	22.500	100 %	25.500	100 %	29.699	100 %	99.340			

Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4.08.22	Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan	Persentase penyaluran rastra	--%	--%	-	100%	21.641	100%	22.500	100%	25.500	100%	29.699	100%	99.340	Kecamatan Tambakromo	
				Persentase penyaluran PKH	--%	--%	-	100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)	--%	--%	-	100%		100%		100%		100%		100%			
		408.4080.2.22.001	Monitoring, pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil monitoring, dan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan	--Laporan	-	-	12	21.641	12	22.500	12	25.500	12	29.699	48	99.340	Kecamatan Tambakromo	

Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan menegakkan pelayanan publik yang tanggap dan profesional kepada masyarakat di wilayah kecamatan				Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	52%	60 %	91.893	65 %	111.446	70 %	129.100	75 %	142.799	80%	161.820	80 %	637.058	Kecamatan Tambakromo	
				Persentase Realisasi Capaian RKPDes	60%	65 %		70 %		75 %		80 %		85%		85 %	-	Kecamatan Tambakromo	
				Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	4%	6%		8%		9%		11 %		12%		12 %			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan			Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100 %	17.500	100 %	24.500	100 %	26.800	100 %	27.500	100 %	33.000	100 %	129.300		

Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4.08.17	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100 %	17.500	100 %	24.500	100 %	26.800	100 %	27.500	100 %	33.000	100 %	129.300		
		408.40802.17.003	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Jumlah dokumen kependudukan yang dikeluarkan	4400 dokumen kependudukan	4.500	17.500	4.600	24.500	4.700	26.800	4.800	27.500	4.900	33.000	23.500	129.300	Kecamatan Tambakromo	
	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan			Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	50%	60 %	15.000	65 %	8.946	70 %	10.800	75 %	18.799	80%	24.820	80 %	78.365		
		4.08.15	Program Pengembangan data/Informasi	Persentase keterisian data monografi kecamatan	75%	78 %	15.000	80 %	8.946	82 %	10.800	85 %	18.799	86%	24.820	86 %	78.365	Kecamatan Tambakromo	

Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Persentase keterisian data profil kecamatan	50%	55%		60%		65%		70%		75%		75%		Kecamatan Tambakromo	
		408.40802.15.006	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen data kecamatan (profil dan monografik kecamatan) yang disusun selama setahun	2 dokumen	2	15.000	2	8.946	2	10.800	2	18.799	2	24.820	10	78.365	Kecamatan Tambakromo	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan			Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	4%	6%	25.393	8%	35.500	9%	37.500	11%	39.000	12%	42.000	12	179.393		
		4.08.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kehadiran masyarakat di MusrenbangDesa	60%	65%	25.393	75%	35.500	78%	37.500	80%	39.000	82%	42.000	4	179.393	Kecamatan Tambakromo	

Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
						2018		2019		2020		2021		2022						
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Persentase kehadiran masyarakat di MusrenbangKecamatan	80%	82 %		85 %		87 %		90 %		92%			4	-	Kecamatan Tambakromo	
		408.4080.2.21.009	PenyelenggaraanMusrenbang RKPD	Jumlah dokumen usulan rencana hasil Jaring Asmara dan MusrenbangKecamatan	2 Dokumen	2	25.393	2	35.500	2	37.500	2	39.000	2	42.000	10	179.393	Kecamatan Tambakromo		
	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa			Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	88%	89 %	34.000	90 %	42.500	91 %	54.000	92 %	57.500	93%	62.000	93 %	250.000			
		4.08.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	90%	91 %	34.000	92 %	42.500	93 %	54.000	94 %	57.500	95%	62.000	95 %	250.000			

Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	75%	77%		79%		81%		83%		85%		85%			
		408.4080 2.19.004	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah laporan pembinaan administrasi keuangan desa yang disusun	4 laporan / rekomendasi	4	34.000	4	42.500	4	54.000	4	57.500	4	62.000	20	250.000	Kecamatan Tambakromo	
Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat diwilayah kecamatan				Pertumbuhan pemohon Paten	35	40	32.000	45	41.500	50	44.500	55	47.600	60	52.000	60	217.600	Kecamatan Tambakromo	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan			Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
						2018		2019		2020		2021		2022						
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	di kecamatan																			
		4.08.20	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	32.000	100%	41.500	100%	44.500	100%	47.600	100%	52.000	100%	217.600			
		408.4080.2.20.010	Fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah izin yang dikeluarkan	60 dokumen izin	70	32.000	80	41.500	80	44.500	100	47.600	110	52.000	440	217.600	Kecamatan Tambakromo		
PRIORITAS III							192.893		265.587		294.602		322.895		358.019		1.433.996			
JUMLAH P-I DAN P-III							491.162		669.624		742.780		814.114		902.671		3.620.351			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Tambakromo yang mengacu pada sasaran RPJMD sebagai tujuan dalam RENSTRA Kecamatan Tambakromo yang diturunkan ke dalam sasaran dan program dengan indikator serta target kinerja yang sudah ditentukan dengan formula yang terukur, indikator kinerja ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Misi 1 : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.							
	Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan.							
	INDIKATOR TUJUAN 1							
1	Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran I : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	INDIKATOR SASARAN 1							
1.1	Persentase pos kampling aktif	55%	60%	63%	66%	70%	75%	75%
	Persentase anggota Linmas aktif	55%	60%	65%	70%	75%	77%	77%
	Sasaran Program : Terwujudnya Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di wilayah kecamatan							
1.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Rasio pos kampling aktif	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,5	5,5
	Rasio anggota Linmas aktif	0,03	0,031	0,032	0,033	0,034	0,035	0,035
	Misi 3 :Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan							
	Tujuan : Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan							
2	INDIKATOR TUJUAN 1							
	Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan	0.645	0.660	0.680	0.685	0.690	0.700	0.700
	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran : Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan							
2.1	INDIKATOR SASARAN 1							
	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.650	0.700	0.715	0.730	0.745	0.760	0.760
	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.550	0.600	0.615	0.630	0.645	0.660	0.660
	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.650	0.700	0.715	0.730	0.745	0.760	0.760
2.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Sasaran Program : Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam lembaga kemasyarakatan							
	Persentase LPMD aktif	30%	40%	50%	60%	70%	75%	75%
	Persentase PKK desaaktif	80%	82%	85%	86%	88%	90%	90%
	Persentase Karang Taruna aktif	40%	44%	48%	58%	60%	65%	65%
	Persentase RT/RW aktif	70%	73%	76%	78%	79%	80%	80%
	Persentase Posyandu aktif	75%	78%	80%	83%	87%	90%	90%
	Sasaran2 :Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.							
2.2	INDIKATOR SASARAN 2							
	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran Program 2 :							
	Meningkatnya koordinasi penyaluran bantuan kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan							
	Meningkatnya koordinasi penyaluran bantuan kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan							
	Meningkatnya koordinasi penyaluran bantuan keagamaan penunjang kebutuhan ibadah masyarakat di wilayah Kecamatan							
2.2.1	INDIKATOR PROGRAM 2 :							
	Persentase penyaluran rastra	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase penyaluran PKH	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir, dll)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik							
	Tujuan : Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepadamasyarakat di wilayah kecamatan							
3	INDIKATOR TUJUAN 3							
	Indek Kepuasan Masyarakat kecamatan terhadap pelayanan kependudukan	52%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
	Persentase Realisasi Capaian RKPDes	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	4%	6%	8%	9%	11%	12%	12%
	Sasaran I : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan							
3.1	INDIKATOR SASARAN 1							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentas e pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran Program 1 : Meningkatnya pelayanan adminsitrase kependudukan kecamatan (KTP, KK)							
3.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran 2: Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan							
3.2	INDIKATOR SASARAN 2.1							
	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	50%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
	Sasaran Program 2.1 :							
	- Tersedianya data monografi kecamatan							
	- Tersedianya data profil kecamatan							
3.2.1	INDIKATOR PROGRAM 2.1							
	Persentase keterisian data monografi kecamatan	75%	78%	80%	82%	85%	86%	86%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase keterisian data profil kecamatan	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
3.3	INDIKATOR SASARAN 2.2							
	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	4%	6%	8%	9%	11%	12%	12%
	Sasaran Program : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan							
3.3.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	60%	65%	75%	78%	80%	82%	82%
	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	80%	82%	85%	87%	90%	92%	92%
	Sasaran 3 : Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa							
3.4	INDIKATOR SASARAN 3							
	Persentase desa dengan administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	88%	89%	90%	91%	92%	93%	93%
	Sasaran Program : Terciptanya administrasi pengelolaan keuangan desa yang tertib							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.4.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
	Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	75%	77%	79%	81%	83%	85%	85%
	Misi 6 : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri							
	Tujuan : Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan							
4	INDIKATOR TUJUAN 4							
	Pertumbuhan pemohon Paten	35	40	45	50	55	60	60
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan							
4.1	INDIKATOR SASARAN 1							
	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran Program : Persentase pelayanan perizinan yang terlayani							
4.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Perubahan Kecamatan Tambakromo dalam penyusunannya memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi saat ini, serta masukan dari aspirasi masyarakat guna mendukung ketercapaian RENSTRA Kecamatan Tambakromo.

Renstra Perubahan Kecamatan Tambakromo Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang berisikan penjabaran visi dan misi Kecamatan selama 5 (lima) tahun dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Pati.

Perubahan Renstra Kecamatan Tambakromo tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilalui yaitu tahun 2018 dan 2019. Hasil pelaksanaan Perubahan Renstra akan menjadi tolok ukur keberhasilan Kecamatan Tambakromo dalam merealisasikan target kinerja yang sudah ditetapkan. Penyusunan Renstra Kecamatan Tambakromo pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu serta perencanaan periode berikutnya guna mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

BUPATI PATI,

Ttd

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010